



## PUTUSAN

Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Bm.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima dalam Persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Erni Binti Yahya, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan

Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Sarae RT.010, RW.

004, Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima,

sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Abdul Salam Bin Abdullah, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,

Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bugis

RT.001, RW. 001, Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten

Bima, sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut di atas;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan

Hal1 dari 16 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA. Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register Perkara Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Bm, pada tanggal 05 Januari 2016, tanpa ada perubahan sedikitpun mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM POSITA**

1. Bahwa, pada tanggal 15 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/64/II/2005 tanggal 19 Mei 2005);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Keluarga Tergugat (Umi Salma) di Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 9 tahun.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : MUHAMMAD ALFIAN (L) Umur 9 Tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
  - b. Tergugat lebih mementingkan Kelurganya ketimbang Penggugat;
  - c. Tergugat sudah menikah lagi ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2015 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karna di usir oleh Tergugat dan orangtuanya, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah

Hal2 dari 16 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA. Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtuanya di Desa Rabakodo Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### **Dalam Petitum**

##### **A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Abdul Salam Bin Abdullah ) Terhadap Penggugat (Erni Binti Yahya );
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

##### **B. Subsidiar :**

Hal3 dari 16 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA. Bm



Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima sesuai Relas Panggilan Nomor 0031/Pdt.G/ 2016 /PA.Bm, tanggal 18 Januari 2016 dan tanggal 27 Januari 2016, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Surat keterangan Domisili Nomor 132/XI/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/64/II/2005 tanggal 19 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000 setelah Hal4 dari 16 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA. Bm



diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat Penggugat, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

Saksi Ke 1. Sumarni binti Ishaka, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt.09 Rw.04 Desa Rabakodo Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat yang sudah menikah lagi tanpa seijin Penggugat dan Tergugat tidak menjamin nafkah Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama ± 1 (satu) tahun dan keduanya sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain serta Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut karena diusir oleh Tergugat;
- Saksi sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh Penggugat ;

Hal5 dari 16 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA. Bm



Saksi Ke 2. Asiah bin Jamaluddin, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt.09 Rw.04 Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat yang sudah menikah lagi dan tidak menjamin nafkah Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama ± 1 (satu) tahun dan keduanya sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain serta Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut ;
- Saksi sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil gugatannya dan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal6 dari 16 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA. Bm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima sesuai Relas Panggilan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 18 Januari 2016 dan tanggal 27 Januari 2016, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan karena keterangan saksi tersebut sangat menentukan arah dari pada pertimbangan di dalam memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1), Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal7 dari 16 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA. Bm



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti mana merupakan Akta Autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, oleh karenanya Penggugat memiliki **legal standing** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar dari gugatan perceraian Penggugat tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat harus mampu membuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan, maka menurut fiksi hukum Tergugat dianggap secara diam-diam telah membenarkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap secara diam-diam membenarkan dalil gugatan Penggugat, tidak berarti gugatan Penggugat harus dikabulkan, karena perkara ini berkaitan dengan hukum orang (personal

Hal8 dari 16 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA. Bm





recht) yakni perkara keluarga yang berhubungan dengan pemutusan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 863.K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan atas pengakuan, apalagi pengakuan secara diam-diam, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut, Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberi keterangan di bawah sumpah dan setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, maka sesuai ketentuan Pasal 307 RBg. telah diperoleh suatu bukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat, Tergugat lebih mementingkan keluarganya ketimbang Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dan sejak bulan Maret tahun 2015 berturut-turut hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan orang tuanya dan selama itu Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak saling mengunjungi sehingga tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri serta keluarga dekat Penggugat telah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan hukum dan oleh karenanya

Hal9 dari 16 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA. Bm



Penggugat dinilai telah mampu untuk membuktikan alasan perceraian secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :

1. Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat yang tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi tanpa seijin Penggugat dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama tanpa nafkah lahir dan batin;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal secara berturut-turut selama  $\pm$  1 (satu) tahun dan Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu pula keduanya sudah tidak saling memenuhi kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang

Haf10 dari 16 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA. 8m



benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam QS. Ar Rum Ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, Pernikahan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan

Hal11 dari 16 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA. Bm



bathin/ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama  $\pm$  1 (satu) tahun berturut-turut dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin / ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian tersebut, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah Nya kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

**Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;**

Hal12 dari 16 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA. Bm



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit ;

Menimbang, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “ **untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri** “ Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ **antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** “;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan juga firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Abdul Salam bin Abdullah**) terhadap Penggugat ( **Erni binti Yahya**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana maksud Pasal 149 RBg ;

Hal13 dari 16 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA. Bm



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-Pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **Abdul Salam Bin Abdullah**) terhadap Penggugat ( **Erni binti Yahya** ) ;

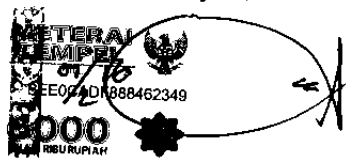
Hal14 dari 16 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA. Bm



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Bima dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, tanggal 01 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1437 Hijriah oleh kami **Mulyadi, S. Ag** sebagai Ketua Majelis dengan di dampingi oleh **Drs. Agus Mubarak** dan **Drs. H. M. Ijmak, SH. MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh, **Dra. Nurhayati** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,



Mulyadi, S. Ag.

Anggota Majelis,

Drs. Agus Mubarak

Anggota Majelis,

Drs. H. M. Ijmak, SH. MH.

Hal15 dari 16 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA. Bm



Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati.

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp.350.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai .....	Rp. 6.000,-
J u m l a h .....	Rp.441.000,-

Hal16 dari 16 hal Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA. 8m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)